

Kemenag Buka Rekrutmen Petugas Haji 2020 Tingkat Daerah

Jakarta (Kemenag) --- Kementerian Agama mulai membuka rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Tahun 2020 tingkat daerah. Proses rekrutmen ini dilakukan secara berjenjang dan transparan, guna mendapatkan petugas yang memiliki kompetensi sekaligus komitmen dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Hal ini disampaikan Kasubdit Bina Petugas Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Ahmad Jauhari, di Jakarta.

"Rekrutmen petugas haji kita lakukan secara berjenjang. Untuk tingkat Kabupaten/Kota, pendaftaran mulai dibuka sejak 20 hingga 29 Januari 2020," jelas Jauhari, Senin (20/01).

Baca juga: [Petunjuk Teknis Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Tahun 2020](#)

Selanjutnya, menurut Jauhari peserta yang lulus seleksi administrasi di Tingkat Kabupaten/Kota akan diumumkan pada 31 Januari 2020. "Mereka kemudian akan mengikuti tes kompetensi tingkat pertama di Kabupaten/Kota pada 4 Februari 2020," tutur Jauhari.

"Peserta yang lolos seleksi di Kabupaten/Kota, berhak mengikuti seleksi di tingkat Kanwil yang akan dilakukan pada 13 Februari 2020," imbuhnya.

Sumber : -

Penulis : Indah Limy

Editor : Indah Limy

<https://kemenag.go.id/berita/read/512608/kemenag-buka-rekrutmen-petugas-haji-2020-tingkat-daerah>



Pemeriksaan BPK, Menag Ingatkan Jajarannya: Jangan Main-main

Jakarta (Kemenag) --- Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mengingatkan seluruh jajarannya untuk tidak main-main dalam penyajian laporan keuangan. Menurutnya, kata “jangan coba main-main” adalah sikap yang harus dipegang teguh dalam pemeriksaan keuangan.

“Ada kata yang saya suka sekali mendengarnya: jangan coba main-main. Saya kira itu sikap kita bersama,” demikian disampaikan Menag dalam acara *Entry Meeting* Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2019 pada Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Pemeriksa Keuangan Haji (BPKH), Jakarta, Senin, (20/01)

Hadir Anggota V BPK RI Bahrullah Akbar, Auditor Utama Keuangan Negara V Novian Herodwijanto beserta seluruh jajaran BPK RI.

Turut mendampingi Menag, Sekretaris Jenderal M. Nur Kholis Setiawan, Plt. Inspektur Jenderal Thomas Pentury, beserta pejabat eselon I dan II lainnya.

Menag juga mengingatkan siapa saja yang terlibat dalam pengerjaan proyek yang ada di Kementerian Agama untuk tidak main-main. Penentuan pemenang lelang adalah karena mekanisme dan panitia menganggap yang terbaik.

“(Penentuan pemenang lelang) Bukan karena jasa Menag, bukan pula karena Wamen, bukan karena Sekjen atau Irjen, dan bukan jasa semua orang yang ada di sini. Oleh sebab itu, anda tidak hutang budi, apalagi uang satu sen pun kepada kami,” tegas Menag.

“Anda hanya hutang kepada bangsa dan negara ini. Kalau anda menyimpang dari itu, anda akan kami laporkan, dan anda akan kami minta dihukum seberat-beratnya,” lanjutnya.

Menag mengaku sudah menginstruksikan seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk bersinergi dengan BPK demi kelancaran pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Agama (LKKA) tahun 2019.

“Kami semua percaya bahwa hasil pemeriksaan BPK ini akan menjadi masukan bagi kami untuk perbaikan kementerian agama dimasa datang,” tandas Menag.

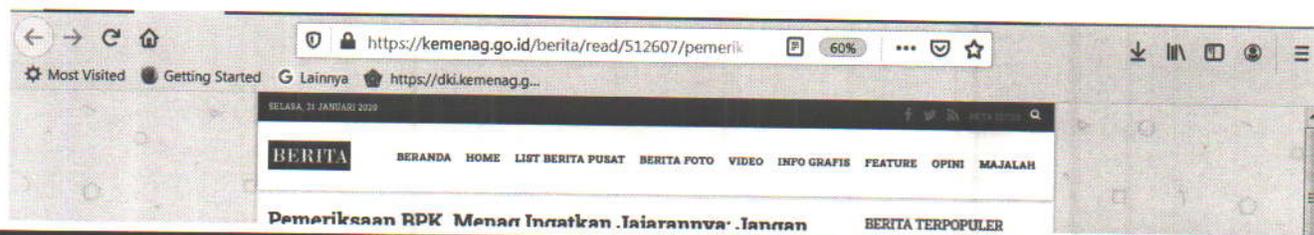
Diketahui, BPK akan melakukan pemeriksaan pada Kementerian Agama tujuh puluh hari terhitung dari Senin, 20 Januari 2020. Ini merupakan kegiatan pemeriksaan rutin yang bertujuan memberikan opini laporan keuangan.

Sumber : -

Penulis : Rusydi

Editor : Khoiron

<https://kemenag.go.id/berita/read/512607/pemeriksaan-bpk--menag-ingatkan-jajarannya--jangan-main-main>



Terbaik Lima Tahun Terakhir, Serapan Anggaran Ditjen Pendis Capai 96,56%

Jakarta --- Serapan anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun 2019 mencapai 96,56%. Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam Imam Safei mengatakan bahwa serapan tersebut adalah yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Data Ditjen Pendidikan Islam mencatat, secara berturut-turut serapan anggaran dalam lima tahun terakhir adalah 91,56% (2015), 94,97% (2016), 95,37% (2017), 92,74% (2018), dan 96,56% (2019).

“Alhamdulillah kita dapat melalui tahun 2019 dengan sangat baik berkat kerja keras dan kerja tim yang solid, speed, dan smart,” kata Imam dalam Rapat Pimpinan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Senin (20/01).

Imam berharap capaian ini dapat menambah semangat, komitmen dan kerja keras ASN Ditjen Pendidikan Islam dalam pelaksanaan program dan tugas di tahun anggaran 2020. “Tugas kita tak pernah selesai karena sebentar lagi kita akan menyambut BPK, setelah itu merealisasikan anggaran dan juga kembali untuk merencanakan program,” katanya.

Rapim dihadiri Direktur Pendidikan Agama Islam Rohmat Mulyana, Direktur PTKI Arskal Salim GP, Direktur KSKK Umar Abdurrahman, serta para Pejabat Eselon III dan IV Ditjen Pendidikan Islam. Hadir juga mantan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren yang baru saja dilantik sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur Ahmad Zayadi.

Sehubungan itu, Rapim juga menjadi momen pelepasan atau mengantar Ahmad Zayadi untuk menjalankan tugasnya sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Zayadi menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada jajaran Ditjen Pendidikan Islam yang telah membantu dan bekerjasama kurang lebih selama 14 tahun sejak 2006.

“Saya bangga menjadi bagian dari Ditjen Pendidikan Islam yang telah ikut berproses dan berdinamika dalam mengembangkan pendidikan Islam,” kata Alumni IAIN Walisongo Semarang ini.

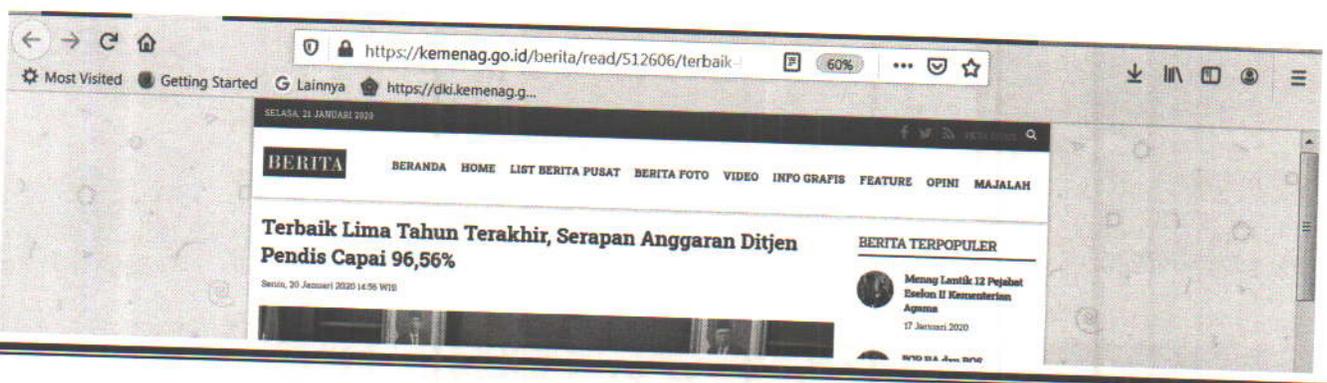
Kegiatan diakhiri dengan penyerahan Memori Jabatan dari Ahmad Zayadi Direktur Pdpontren kepada Dirjen Pendidikan Islam yang diwakili oleh Sesditjen Pendidikan Islam Imam Safei, dilanjutkan ramah tamah dan gema sholawat. (RB)

Sumber : Ditjen Pendis

Penulis : Kontri

Editor : Khoiron

<https://kemenag.go.id/berita/read/512606/terbaik-lima-tahun-terakhir--serapan-anggaran-ditjen-pendis-capai-96-56--->



Diikuti 2000 Tim, Siswa MAN 2 Kota Malang Juara 1 Olimpiade Farmasi

Malang (Kemenag) --- Fakultas Farmasi Universitas Airlangga (UNAIR) menyelenggarakan Kompetisi Farmasi Seluruh Indonesia (KOFEIN) 2020. Salah satu cabang lombanya adalah Olimpiade Farmasi (OLFA) bagi siswa SMA/SMK di seluruh Indonesia.

Kompetisi yang diadakan pada 12, 17, dan 18 Januari 2020 di Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Kampus C Surabaya ini diikuti sekitar 2000 tim dari seluruh Indonesia. Ikut serta dalam kompetisi ini, siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Malang.

“Alhamdulillah, siswa MAN 2 Kota Malang berhasil merebut Juara 1 dan juara 3 OLFAR 2020,” terang Kepala MAN 2 Kota Malang Binti Maqsudah di Malang, Senin (20/01).

Dijelaskan Binti Maqsudah, OLFAR adalah bagian dari KOFEIN yang merupakan kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan di awal tahun sebagai bagian dari program kerja Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Farmasi UNAIR. Ajang ini bertujuan memperkenalkan apa itu farmasi kepada para siswa SMA agar mereka mendapat pencerahan saat akan memilih jurusan kuliah.

Menurut Binti Maqsudah, MAN 2 Kota Malang mengirim tiga tim dalam ajang ini. Tim A beranggotakan, Umar Fakhurazi (XII IPA 7), M. Gary Irhami Azka E. (XII IPA 5), dan Alin Adzkanuha (XII IPA 2). Anggota tim B terdiri atas: Dzumirrotunnisa Retsa R (XII IPA 6), M. Irsyad Ramadhan (XII IPA 6), dan M. Anin Nabail A (XI IPA 8). Sedangkan tim C diketuai oleh Habib Luthfi.

Kompetisi dimulai pada 12 Januari 2020 dengan tahapan seleksi yang berlangsung di 18 rayon yang berbeda-beda. Dari tahap seleksi tersebut, terjaring 40 Tim terbaik yang lolos ke babak perempat final yang diadakan pada 17 Januari 2020. “Tiga tim MAN 2 Kota Malang lolos ke Babak Perempat Final,” ujar Binti Maqsudah.

Pada perempat final, diadakan rally games untuk dijaring 15 tim terbaik yang masuk ke babak semifinal. Di tahap ini, hanya dua tim MAN 2 Kota Malang yang lolos, yaitu: Tim A dan Tim B. Babak semifinal diadakan pada 18 Januari 2020. Peserta diminta mengerjakan essay.

“Dua tim MAN 2 Kota Malang berhasil lolos ke babak final. Keduanya menjadi bagian dari lima tim terbaik,” jelasnya.

“Babak final dilakukan dengan kuis cerdas cermat dan praktikum. Tim A MAN 2 Kota Malang berhasil merebut Juara 1, dan tim B berhasil mendapat juara 3,” tandasnya.

Sumber : MAN 2 Kota Malang

Penulis : Kontri

Editor : Khoiron

<https://kemenag.go.id/berita/read/512605/diikuti-2000-tim--siswa-man-2-kota-malang-juara-1-olimpiade-farmasi>

Bukan Tempat Buangan, Karo HKLN: Harus Tegas Penjadwalan dan Ada Anggaran

Jakarta (Kemenag) --- Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri (HKLN) hari ini menggelar serah terima jabatan dari Plt Kepala Biro HKLN Syafrizal kepada Kepala Biro yang baru, Mudhofir. Sebelumnya, Mudhofir adalah Kepala Pusat Agama Khonghucu.

Serah terima jabatan berlangsung di Kantor HKLN, Gedung Kementerian Agama, Jakarta. Hadir, jajaran pejabat Biro HKLN.

"Kita punya tugas dan fungsi yang harus dipertanggungjawabkan secara moral. Untuk itu, Biro Hukum jangan jadi tempat buangan saja, harus tegas penjadwalan dan ada anggarannya," tegas Mudhofir di Jakarta, Senin (20/01).

"Untuk itu, kita harus konsisten kuat. Harus kerja sampai tuntas, ada jadwal jelas dan target," lanjutnya.

Mudhofir dilantik sebagai Karo HKLN oleh Menag Fachrul Razi pada 17 Januari 2020. Menurutnya, pelantikan itu sebagai fakta dan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. "Suka atau tidak, ini harus diterima, kita punya tanggung jawab bersama untuk menjalankan tugas. Apapun itu, fakta sudah dilantik dan sah itu sesuatu yang harus saya jalankan," ujarnya.

Sebelumnya, Plt Kepala Biro HKLN Syafrizal menyampaikan bahwa serapan anggaran tahun 2019 mencapai 85 persen. "Ini merupakan capaian tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Semoga di tahun mendatang dapat ditingkatkan," kata Kepala Biro Umum ini.

Syafrizal juga menyampaikan apresiasi kepada jajarannya di Biro HKLN atas kerja sama yang berjalan selama menjabat sebagai pelaksana tugas. Alhamdulillah sudah berjalan baik, baik dari tugas dan anggaran. Semoga tidak ada temuan," tandasnya.

Kepada Kabiro yang baru, Syafrizal mengucapkan selamat dan semoga membawa manfaat.

Sumber : -

Penulis : Ruwaidah

Editor : Khoiron

<https://kemenag.go.id/berita/read/512604/bukan-tempat-buangan--karo-hkln--harus-tegas-penjadwalan-dan-ada-anggaran>



Tim MAN 2 Kota Malang Sabet Emas dan Perak OLGENAS UGM 2020

Yogyakarta (Kemenag) --- Tim Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Malang unjuk prestasi di ajang Olimpiade Geografi Nasional (OLGENAS) XV 2020. Dua tim yang dikirim berhasil meraih medali emas dan perak.

OLGENAS merupakan program kompetisi tahunan yang digelar Fakultas Geografi Universitas Gajah Mada (UGM). Tahun ini, OLGENAS berlangsung dari 15 – 17 Januari dan diikuti 151 SMA/MA terbaik se Indonesia. Tiap sekolah/madrasah hanya boleh mengirimkan dua tim dengan masing-masing dua personel. OLGENAS XV bertepatan dengan lustrum Fakultas Geografi.

Kepala MAN 2 Kota Malang Binti Maqsudah mengatakan, madrasahnya mengurum dua tim dengan satu guru pendamping pada OLGENAS XV 2020. Tim A diwakili Faizza Choirun Nabila (XI IPS) dan Aisyah Azka Nurul Fitriyah S. (XII IPA). Tim B diwakili Moch. Rangga Alif Dharmawan (XI IPA) dan Ahmad Zaky Mubaarok Mauludy (XI IPA).

“Tim A berhasil meraih Medali Perak dan Tim B berhasil meraih Medali emas,” terang Binti Maqsudah di Malang, Senin (20/01).

“Tim B juga meraih Best Written Test karena mendapatkan nilai tertinggi dalam tes tulis. Moc. Rangga Alif Dharmawan juga mendapatkan Best Poster dan Best Presentation saat menampilkan hasil Geography Creative Collaboration atau GCC,” sambungnya.

Menurut Binti Maqsudah, OLGENAS terbagi atas beberapa tahapan. Hari pertama, peserta mengerjakan soal writing test (berbahasa Inggris) selama 90 menit. Ada 75 soal yang harus dijawab. Selanjutnya, peserta mengerjakan 40 soal multimedia.

Hari kedua, lanjut Binti Maqsudah, kegiatan dimulai dengan mengerjakan test di lapangan atau outdoor learning test dengan mengunjungi waduk Kamijoro di Kulonprogo, DIY. Selanjutnya, kegiatan ditutup dengan melakukan test geografi, meliputi: pembuatan poster, log book, dan studi kasus dengan nama Geography Creative Collaboration (GCC).

“Hari terakhir, lima tim terbaik secara kolaborasi dalam kelompok baru menampilkan hasil GCC mereka,” tandasnya.

Sumber : MAN 2 Kota Malang

Penulis : Kontri

Editor : Khoiron

<https://kemenag.go.id/berita/read/512603/tim-man-2-kota-malang-sabet-emas-dan-perak-olgenas-ugm-2020>



MATAKIN Gelar Imlek Nasional 2 Februari 2020

Jakarta (Kemenag) --- Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN) akan menggelar perayaan Tahun Baru Imlek Nasional pada 2 Februari 2020, di Jakarta. Hal ini disampaikan Ketua Umum Dewan Rohaniwan MATAKIN Ws Budi Santoso Tanuwibowo saat menemui Menteri Agama Fachrul Razi di Kantor Kementerian Agama, Jakarta.

Menurut Ws Budi, Tahun Baru Imlek yang jatuh pada 25 Januari mendatang menandai pergantian tahun 2571 Kongzili. Umat Khonghucu menurut Ws Budi mengharapkan kehadiran Presiden Jokowi dalam perayaan Imlek Nasional tersebut.

“Melalui Pak Menteri, kami mohon bantuan menyampaikan ke Pak Presiden agar bisa hadir pada perayaan Imlek Nasional,” ungkap Ws Budi, Senin (20/01).

Menanggapi hal tersebut, Menag Fachrul Razi berjanji akan menyampaikan undangan tersebut kepada Presiden Jokowi. “Terimakasih atas undangannya. Permintaannya akan saya teruskan, semoga Beliau bisa hadir,” ujar Menag Fachrul.

Hadir mendampingi Menag Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Mudhofir, Kepala Bagian Humas Ubaidillah, dan Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan Khoirul Huda.

Sumber : -

Penulis : Ruwaidah

Editor : Indah Limy

<https://kemenag.go.id/berita/read/512602/matakin-gelar-imlek-nasional-2-februari-2020>



MATAKIN Harap Jokowi Hadiri Perayaan Imlek Nasional

daulat.co – Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN) akan menggelar perayaan Tahun Baru Imlek Nasional pada 2 Februari 2020, di Jakarta. Hal ini disampaikan Ketua Umum Dewan Rohaniwan MATAKIN Ws Budi Santoso Tanuwibowo saat menemui Menteri Agama Fachrul Razi di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Senin (20/1).

Menurut Ws Budi, Tahun Baru Imlek yang jatuh pada 25 Januari mendatang menandai pergantian tahun 2571 Kongzili. Umat Khonghucu menurut Ws Budi mengharapkan kehadiran Presiden Jokowi dalam perayaan Imlek Nasional tersebut.

“Melalui Pak Menteri, kami mohon bantuan menyampaikan ke Pak Presiden agar bisa hadir pada perayaan Imlek Nasional,” ungkap Ws Budi.

Menanggapi hal tersebut, Menag Fachrul Razi berjanji akan menyampaikan undangan tersebut kepada Presiden Jokowi. “Terimakasih atas undangannya. Permintaannya akan saya teruskan, semoga Beliau bisa hadir,” ujar Menag Fachrul.

Hadir mendampingi Menag Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Mudhofir, Kepala Bagian Humas Ubaidillah, dan Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan Khoirul Huda.

<http://daulat.co/matakin-harap-jokowi-hadiri-perayaan-imlek-nasional/>



Djulaidi Jabat Plt Kakanwil Kemenag Aceh, Ini Posisi Tugas Sebelumnya

SERAMBINNEWS.COM, BANDA ACEH - Menteri Agama RI, Jenderal (Purn) Fachrul Razi menunjuk Djulaidi Kasim MAg sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh.

Sebelumnya, Djulaidi menjabat Kepala Bidang Pendidikan Diniyah Pondok Pesantren Kanwil Kemenag Aceh.

Penunjukan Djulaidi sebagai Plt Kakanwil Kemenag Aceh menyusul pemutasian Daud Pakeh sebagai Kepala Biro Administrasi Umum Perencanaan Keuangan dan Kepegawaian UIN Sultan Thaha Saifuddin, Jambi pada pelantikan beberapa hari lalu oleh Menag, di Jakarta.

Informasi tersebut disampaikan Kepala Sub Bagian Umum dan Humas Kanwil Kemenag Aceh, Safrizal SPd, Senin (20/1/2020).

"Untuk Pelaksana Tugas Kakanwil Kemenag Aceh dijabat Pak Djulaidi yang saat ini menjabat Kabid Pendidikan Diniyah Pontren Kanwil Kemenag Aceh," ujar Safrizal.

Safrizal menyebutkan Daud Pakeh telah menjabat sebagai Kakanwil Kemenag Aceh selama 4 tahun 11 bulan.

Ia mulai menjabat sebagai Kakanwil mulai 5 Maret 2015 silam menggantikan Ibnu Sa'dan.

"Kami ucapkan selamat menjalankan amanah baru kepada Bapak Daud Pakeh dan selamat menjalankan tugas kepada Bapak Djulaidi," kata Safrizal.(*)

<https://aceh.tribunnews.com/2020/01/20/djulaidi-jabat-plt-kakanwil-kemenag-aceh-ini-posisi-tugas-sebelumnya>



Menag: Uang Saku Tetap Malah Makan Jamaah Tambah

IHRAM.CO.ID, JAKARTA— Menteri Agama RI Fachrul Razi memastikan tidak akan memotong jatah uang saku atau living cost jamaah haji.

Bahkan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini Kementerian Agama (Kemenag) akan menambah jatah makan dari 40 kali menjadi 50 kali. "Jatah makan jadi 50 kali," kata Fachrul saat dihubungi Republika.co.id, Senin

Fachrul menyampaikan, alasan Kemenag mengeluarkan kebijakan jamaah mesti mendapat jatah makan dari sebelumnya 40 kali menjadi 50 kali itu untuk perbaikan kualitas pelayanan pemerintah kepada jamaah haji.

Selain itu jamaah haji juga menjadi lebih khusus ibadah. "Mudah-mudahan dengan itu jamaah menjadi lebih khusuk beribadah. Amin," katanya.

Setelah mendapat masukan dari beberapa pihak terutama Komisi VIII, Kemenag menarik kembali rencananya untuk memangkas uang saku jamaah. Untuk itu tahun ini jatah uang saku untuk jamaah haji tetap sebesar 1.500 Riyal. "Tetap sama dengan tahun lalu 1.500 Riyal," katanya.

Sebelumnya Komisi VIII DPR sudah satu suara menolak rencana Kementerian Agama memangkas uang saku (*living cost*) jamaah haji. Penolakan telah disampaikan Komisi VIII saat rapat pembahasan BPIH 1441/2020 yang digelar di Cisarua, Bogor, Kamis (16/1).

"Iya, (Komisi VIII) sudah satu suara tidak boleh ada pemangkasan *living cost*," kata Wakil Ketua Komisi VIII, Ace Hasan Syadzily, saat dihubungi Republika.co.id, Jumat (17/1).

Ace mengatakan, jika melihat perkembangan sekarang ini, terutama nilai mata uang rupiah menguat atas dolar, maka tidak sepatutnya Kementerian Agama memangkas jatah uang saku jamaah haji.

Apalagi, tradisi pemberian uang saku kepada jamaah sudah lama dilakukan. "Jika melihat dinamika sekarang ini seperti fluktuasi nilai mata uang yang semakin menguat ditambah lagi penyesuaian tempat-tempat lain seharusnya itu menegaskan memang tidak ada pengurangan untuk *living cost*," katanya.

Atas dasar itulah, kata Ace, Komisi VIII meminta Kemenag tidak memangkas uang saku jamaah. Ace meminta Kemenag melihat proses penetapan BPIH, pada 2019 ketika nilai mata uang melemah atas dolar namun tidak ada kenaikan biaya dan pemangkasan *living cost*.

"Dulu saja waktu kami membahas dengan asumsi dolar 14.200 pada tahun 2019 jamaah haji masih mendapatkan *living cost* apalagi ini rupiah menguat," katanya.

Ace mengatakan, rencana pemangkasan uang saku jamaah memang diusulkan Kementerian Agama dan disetujui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Namun, kata Ace meski BPKH menyetujui pemangkasan itu, Komisi VIII sepakat menolak. "Jadi kami mendesak untuk tidak memotong *living cost* tersebut," katanya.

<https://ihram.co.id/berita/q4erbl320/menaguangsakutetapmalahmakanjamaahtambah>

Menag Ingatkan Pegawainya Jangan Ada Manipulasi Laporan Keuangan

RMco.id Rakyat Merdeka - Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mengingatkan seluruh jajarannya untuk tidak main-main dalam penyajian laporan keuangan.

Menurutnya, kata “jangan coba main-main” adalah sikap yang harus dipegang teguh dalam pemeriksaan keuangan.

“Ada kata yang saya suka sekali mendengarnya: jangan coba main-main. Saya kira itu sikap kita bersama,” demikian disampaikan Menag dalam acara Entry Meeting Pemeriksaan atas Laporan Keuangan di 2019 pada Kementerian Agama dan Badan Pemeriksa Keuangan Haji (BPKH), Jakarta, Senin, (20/01).

Turut hadir Anggota V BPK, Bahrullah Akbar, Auditor Utama Keuangan Negara V, Novian Herodwijanto beserta seluruh jajaran BPK, Sekretaris Jenderal, M Nur Kholis Setiawan, Plt. Inspektur Jenderal Thomas Pentury, beserta pejabat eselon I dan II lainnya.

Menag juga mengingatkan siapa saja yang terlibat dalam pengerjaan proyek yang ada di Kementerian Agama untuk tidak main-main

Penentuan pemenang lelang adalah karena mekanisme dan panitia menganggap yang terbaik.

“Penentuan pemenang lelang Bukan karena jasa Menag, bukan pula karena Wamen, bukan karena Sekjen atau Irjen, dan bukan jasa semua orang yang ada di sini. Oleh sebab itu, anda tidak hutang budi, apalagi uang satu sen pun kepada kami,” tegas Menag.

“Anda hanya hutang kepada bangsa dan negara ini. Kalau anda menyimpang dari itu, anda akan kami laporkan, dan anda dihukum seberat-beratnya,” lanjutnya.

Menag mengaku, sudah menginstruksikan seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk bersinergi dengan BPK demi kelancaran pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Agama (LKKA) tahun 2019.

“Kami semua percaya bahwa hasil pemeriksaan BPK ini akan menjadi masukan baginya untuk perbaikan kementerian agama dimasa datang,” tandas Menag.

Diketahui, BPK akan melakukan pemeriksaan pada Kementerian Agama tujuh puluh hari terhitung dari Senin, 20 Januari 2020. Ini merupakan kegiatan pemeriksaan rutin yang bertujuan memberikan opini laporan keuangan. (KPJ)

<https://rmco.id/baca-berita/government-action/26646/menag-ingatkan-pegawainya-jangan-ada-manipulasi-laporan-keuangan>

Jadwal Rekrutmen Petugas Haji 2020 Tingkat Daerah Mulai 20 Januari

Tirtoid --Kementerian Agama (Kemenag) membuka rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji 2020 tingkat daerah. Masa pendaftaran rekrutmen ini dimulai pada Senin, 20 Januari 2020.

Kasubdit Bina Petugas Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Ahmad Jauhari menyatakan rekrutmen ini dilakukan secara berjenjang dan transparan. Menurut dia, Kemenag berharap rekrutmen ini menghasilkan petugas yang memiliki kompetensi dan komitmen menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020.

“Rekrutmen petugas haji kami lakukan secara berjenjang. Untuk tingkat Kabupaten/Kota, pendaftaran mulai dibuka sejak 20 hingga 29 Januari 2020,” kata Jauhari, Senin (20/1/2020), seperti dilansir laman Kemenag. Jauhari menambahkan daftar nama peserta yang lulus tahap seleksi administrasi di Tingkat Kabupaten/Kota akan diumumkan pada 31 Januari 2020

. “Mereka kemudian akan mengikuti tes kompetensi tingkat pertama di Kabupaten/Kota pada 4 Februari 2020,” ujar dia. Setelah itu, kata Jauhari, peserta yang lolos seleksi di tingkat Kabupaten/Kota, berhak mengikuti seleksi di tingkat Kantor Wilayah (Kanwil) atau provinsi pada 13 Februari 2020. Berdasarkan Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 10 Tahun 2020, jadwal pelaksanaan rekrutmen petugas Haji 2020 selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Pendaftaran Seleksi Tingkat I (Kabupaten/Kota) dan Seleksi Administrasi: 20-29 Januari 2020
2. Pengumuman Peserta Lulus Seleksi Administrasi: 31 Januari 2020
3. Tes Kompetensi Tingkat Kantor Kemenag Kabupaten/Kota: 4 Februari 2020
4. Penyerahan Hasil Seleksi Tingkat Kabupaten/Kota ke Kanwil Provinsi: 5-7 Februari 2020
5. Pengumuman Peserta yang Berhak Ikut Seleksi Tahap Kedua di Kanwil Provinsi: 10 Februari 2020
6. Seleksi Tahap II Berupa Tes Kompetensi Online/CAT dan wawancara di Kanwil Provinsi: 13 februari 2020
7. Pengumuman Hasil Seleksi Tahap Kedua: 18 Februari 2020
8. Pembekalan dan Pelatihan Petugas Haji/PPIH Kloter: 26 Februari-31 Maret 2020
9. Usulan Calon PPIH Kloter untuk Ditetapkan sebagai PPI Kloter 2020: 6 April 2020
10. Tes Kompetensi online/CAT dan wawancara di tingkat Eselon I Pusat: 18 Maret 2020
11. Rekrutmen Petugas Khusus (Konsultan dan P3JH dll): 23-27 Maret 2020
12. Pengumuman Calon PPIH Arab Saudi yang berhak ikut pelatihan: 5 April 2020
13. Pelatihan/Pembekalan Petugas PPIH Arab Saudi: 10 April 2020

<https://tirtoid/jadwal-rekrutmen-petugas-haji-2020-tingkat-daerah-mulai-20-januari-etTG>

The screenshot shows a web browser displaying the article page on the Tirtoid website. The browser's address bar shows the URL: <https://tirtoid/jadwal-rekrutmen-petugas-haji-2020-tingkat-daerah-mulai-20-januari-etTG>. The website header includes the Tirtoid logo, navigation links like 'JELAJAH INDEPTH MILD REPORT CURRENT ISSUE', and a banner for 'MENGAKHIRI PERANG DUNIA I' dated 21 January 1920. The main content area features the article title 'Jadwal Rekrutmen Petugas Haji 2020 Tingkat Daerah Mulai 20 Januari' in a large, bold font. Below the title is a wide image showing a crowd of people, likely pilgrims, and a small dark box with the text 'pake night mode biar ga silaww'.

KPAI Minta Kemenag Turun Tangan Soal Ustaz Cabuli 3 Santri di Bondowoso

Jakarta - Ketua KPAI, Susanto menyalahkan perilaku ustaz di Kecamatan Wonosari, Bondowoso, AQ yang mencabuli tiga santriwatinya. Susanto berharap Kementerian Agama (Kemenag) tingkat kabupaten atau kota turun tangan dalam kasus tersebut.

"Kami menyalahkan atas kejadian tersebut. Apapun alasannya tidak dapat dibenarkan," tutur Susanto saat dihubungi, Senin (20/1/2020) malam.

Susanto berharap Kemenag meningkatkan literasi hukum perlindungan anak. Terutama menjelaskan kepada guru ataupun pengajar.

"Untuk memastikan perlindungan anak, kami berharap kerjasama dan komitmen Kementerian Agama RI hingga kantor Kementerian Agama tingkat Kabupaten/Kota untuk meningkatkan literasi hukum perlindungan anak terutama bagi para pihak yang mengabdikan dirinya dekat dengan anak termasuk guru agama," kata dia.

Susanto menyebut kesadaran hukum perlu ditingkatkan di lingkungan sekolah. Serta budaya perlindungan anak di masyarakat juga perlu ditingkatkan.

"Hal ini penting agar kesadaran hukum semakin meningkat dan budaya perlindungan anak semakin tumbuh di masyarakat," pungkasnya

Seorang ustaz inisila AQ di Kecamatan Wonosari, Bondowoso menjadi tersangka kasus pencabulan. Dia mencabuli tiga santriwatinya di madrasah.

Berdasarkan bukti laporan bernomor LP/258/XII/2019/JATIM/RES.BWO, tiga santriwati yang menjadi korban pencabulan masih di bawah umur. Ketiganya juga sudah divisum oleh polisi.

"Tiga orang korban yang merupakan santrinya memang telah melapor, diantar orang tua masing-masing. Mereka lalu kami mintakan visum," kata Kasat Reskrim Polres Bondowoso AKP Jamal kepada detikcom di kantornya, Senin (20/1).

<https://news.detik.com/berita/d-4866955/kpai-minta-kemenag-turun-tangan-soal-ustaz-cabuli-3-santri-di-bondowoso/2>

Most Visited Getting Started Lainnya <https://dki.kemenag.g...>

MENU Cari Berita [Daftar detikID](#) [Masuk](#)

KPAI Minta Kemenag Turun Tangan Soal Ustaz Cabuli 3 Santri di Bondowoso

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Selasa, 21 Jan 2020 06:22 WIB

15 komentar

SHARE [f](#) [t](#) [w](#)

RUMAH DI KAWASAN GOLF
"Happiest Way of Living"
Bonus AC TIAP KAMAR SMART HOME SYSTEM
HARGA MULAI 1M-an*
Cicilan 5JT-an* / Bulan

Rekrutmen Petugas Haji Tingkat Daerah Dibuka 20-29 Januari 2020

KEMENTERIAN Agama (Kemenag) terus mematangkan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2020. Salah satu yang sedang digodok adalah komposisi **petugas haji**.

Kemenag mulai membuka rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Tahun 2020 tingkat daerah. Hal tersebut dilakukan secara berjenjang dan transparan, guna mendapatkan **petugas haji** yang memiliki kompetensi sekaligus komitmen dalam penyelenggaraan rukun Islam yang kelima tersebut.

"Rekrutmen petugas haji kita lakukan secara berjenjang. Untuk tingkat Kabupaten/Kota, pendaftaran mulai dibuka sejak 20 hingga 29 Januari 2020," ujar Kasubdit Bina Petugas Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Ahmad Jauhari sebagaimana dikutip dari laman resmi Kemenag pada Selasa (21/1/2020).

Selanjutnya, peserta yang nantinya lulus seleksi administrasi di Tingkat Kabupaten/Kota akan diumumkan pada 31 Januari 2020. "Mereka kemudian akan mengikuti tes kompetensi tingkat pertama di Kabupaten/Kota pada 4 Februari 2020," tutur Jauhari.

"Peserta yang lolos seleksi di Kabupaten/Kota berhak mengikuti seleksi di tingkat Kanwil yang akan dilakukan pada 13 Februari 2020," imbuhnya.

(abp)

<https://muslim.okezone.com/read/2020/01/21/614/2155838/rekrutmen-petugas-haji-tingkat-daerah-dibuka-20-29-januari-2020>

HOME // MUSLIM // SERBA-SERBI

Rekrutmen Petugas Haji Tingkat Daerah Dibuka 20-29 Januari 2020

Abu Sahma Pane, Jurnalis · Selasa 21 Januari 2020 07:33 WIB

Great airfares to worldwide destinations just a click away.

Lufthansa

Menag Ingatkan Jajarannya Jangan Main-main Soal Laporan Keuangan

Hidayatullah.com— Kata “jangan coba main-main” merupakan sikap yang harus dipegang teguh jajaran Kementerian Agama dalam pemeriksaan keuangan. Demikian disampaikan Menteri Agama Fachrul Razi kepada seluruh jajarannya untuk tidak main-main dalam penyajian laporan keuangan.

Hal itu ditekankan Menag Fachrul dalam acara *Entry Meeting* Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2019 pada Kemenag dan Badan Pemeriksa Keuangan Haji (BPKH) di Jakarta kemarin. BPK melakukan pemeriksaan pada Kemenag selama tujuh puluh hari terhitung sejak Senin (20/01/2020).

Kegiatan pemeriksaan rutin bertujuan memberikan opini laporan keuangan.

“Ada kata yang saya suka sekali mendengarnya: jangan coba main-main. Saya kira itu sikap kita bersama,” ujar Menag.

Ia mengaku sudah menginstruksikan seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk bersinergi dengan BPK, demi kelancaran pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Agama (LKKA) tahun 2019.

“Kami semua percaya bahwa hasil pemeriksaan BPK ini akan menjadi masukan bagi kami untuk perbaikan Kementerian Agama di masa datang,” ujar Mantan Wakil Panglima TNI ini kutip website resmi kementerian.

Hadir Anggota V BPK RI Bahrullah Akbar, Auditor Utama Keuangan Negara V Novian Herodwijanto bersama seluruh jajaran BPK RI. Turut hadir mendampingi Menag, Sekretaris Jenderal M Nur Kholis Setiawan, Plt Inspektur Jenderal Thomas Pentury, serta pejabat eselon I dan II lainnya.

Menag pun mengingatkan siapa saja yang terlibat dalam pengerjaan proyek yang ada di Kemenag agar tidak main-main. Penentuan pemenang lelang adalah karena mekanisme dan panitia menganggap yang terbaik.

Jenderal (Purnawirawan) TNI ini menegaskan, “(Penentuan pemenang lelang) bukan karena jasa Menag, bukan pula karena Wamen, bukan karena Sekjen atau Irjen, dan bukan jasa semua orang yang ada di sini. Oleh sebab itu, anda tidak hutang budi, apalagi uang satu sen pun kepada kami.”

“Anda hanya hutang kepada bangsa dan negara ini. Kalau anda menyimpang dari itu, anda akan kami laporkan, dan anda akan kami minta dihukum seberat-beratnya,” tambahnya.*

Rep: Admin Hidcom

Editor: Muhammad Abdus Syakur

<https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2020/01/21/176672/menag-ingatkan-jajarannya-jangan-main-main-soal-laporan-keuangan.html>

Menag: Uang Saku Jamaah Tetap 1.500 Riyal

• ALI YUSUF,
ZAHROTUL OKTAVIANI

**Kemenag diminta
memberi layanan
terbaik kepada jamaah
haji.**

JAKARTA — Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi menarik kembali rencana memangkas jatah uang saku (*living cost*) jamaah haji Indonesia dari 1.500 riyal menjadi 1.000 riyal. Fachrul memastikan tahun ini tidak ada pemotongan uang saku sebesar 500 riyal seperti yang diwacanakan.

"Tetap sama dengan tahun lalu, 1.500 riyal," ujar Fachrul saat dihubungi *Republika*, Ahad (19/1).

Kemenag juga akan menambah jumlah layanan makan kepada jamaah haji dari 40 kali menjadi 50 kali. "Jatah makan jadi 50 kali," ujar Menag.

Penambahan layanan makan itu, menurut Menag, dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada jamaah haji. Selain itu, jamaah diharapkan jadi lebih khuyuk beribadah.

"Mudah-mudahan dengan itu jamaah menjadi lebih khuyuk beribadah. *Aamiin*," katanya.

Adapun wacana pemangkasan uang saku jamaah haji disampaikan Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu Kemenag, Maman Saepulloh, Rabu (15/1) lalu. Besaran uang saku yang biasanya senilai 1.500 riyal (sekitar Rp 5,4 juta) diwacanakan dipotong menjadi 1.000 riyal (sekitar Rp 3,6 juta).

"Didasarkan pertimbangan jumlah atau jatah *katering* makan jamaah selama berada di Makkah tahun ini dibandingkan tahun lalu. Jatah makan jamaah tahun ini bertambah sehingga akan menambah Bipih," ujar dia.

Anggota Komisi VIII DPR Iskan Qolba Lubis mengapresiasi keputusan Kemenag membatalkan rencana memotong jatah uang saku jamaah haji. Menurut dia, tidak tepat Kemenag memotong uang saku sebelum disosialisasikan secara maksimal kepada para jamaah haji.

"Kurang tepat dipangkas tahun ini karena sosialisasinya terlalu pendek," katanya.

Ia juga menilai, tidak akan efektif jika kebijakan pemotongan uang saku diterapkan Kemenag tahun ini. Selain tidak ada sosialisasi, menurut dia, jamaah juga sudah terbiasa meneri-

ma uang saku sebesar 1.500 riyal. Uang tersebut biasanya digunakan jamaah untuk membayar denda atau dam serta keperluan lain pascapuncak haji.

Terkait hal ini, sebelumnya Komisi VIII DPR menolak wacana pemangkasan uang saku tersebut. Penolakan disampaikan saat rapat pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1441 H/2020 M di Cisarua, Bogor, Kamis (16/1).

"Iya (Komisi VIII) sudah satu suara tidak boleh ada pemangkasan *living cost*," ungkap Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily saat dihubungi *Republika*, Jumat (17/1).

Ace mengatakan, jika melihat perkembangan sekarang ini, terutama nilai mata uang rupiah yang menguat atas dolar AS, tidak sepatutnya Kemenag memangkas jatah uang saku jamaah haji. Apalagi, tradisi pemberian uang saku kepada jamaah sudah lama dilakukan.

Atas dasar itulah, kata Ace, Komisi VIII DPR meminta Kemenag tidak memangkas uang saku jamaah. Kemenag diminta melihat kembali proses penetapan BPIH pada tahun 2019 ketika nilai mata uang rupiah melemah atas dolar AS, tapi tidak ada kenaikan BPIH dan pemangkasan *living cost*.

"Dulu saja waktu kami membahas dengan asumsi dolar 14.200 pada tahun 2019, jamaah haji masih mendapatkan *living cost*, apalagi ini rupiah menguat," ujar dia.

Ace juga menegaskan, dalam rapat pembahasan BPIH yang digelar pada 15-17 Januari 2020 tersebut, pihaknya telah memperjuangkan agar semua hak jamaah haji Indonesia tahun 2020 terpenuhi. Selain menolak pemangkasan *living cost*, Komisi VIII DPR juga mendesak tidak ada pengurangan jatah makan.

Bertempat di Wisma DPR, Cisarua, Bogor, rapat pembahasan BPIH 1441 H/2020 M diikuti Komisi VIII DPR, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, serta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) juga menyatakan keberatan atas rencana tersebut. "Kita keberatan, kita menolak. Sebaiknya semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan haji ini, mari memberikan yang terbaik bagi jamaah," ujar Ketua Umum PP IPHI, Ismed Hasan Putro.

Ia menegaskan, sudah saatnya bagi pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag memberi servis terbaik bagi jamaah haji Indonesia.

■ ed: wachidah handasah

KUII Diharapkan Dorong Amendemen UU Zakat

● **UMAR MUKHTAR**

JAKARTA – Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Zainulbahar Noor mengatakan, Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-7 perlu mendorong amendemen terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menurut dia, amendemen ini akan mengoptimalkan potensi zakat yang nilainya lebih dari Rp 300 triliun.

"Perlu ada amendemen UU Zakat dan Peraturan Presiden agar zakat ini tidak saja dikenakan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdaftar di pusat, tapi juga menginstruksikan ke (ASN di) kabupaten/kota secara pasti. Tapi, dana itu tersentralisasi di Baznas, yang dibuat dengan amendemen (UU Zakat)," kata Zainulbahar dalam *focus group discussion* (FGD) bertajuk "Strategi Perjuangan Umat Islam In-

donesia dalam Bidang Filantropi", di Kantor MUI Pusat, Jakarta, Senin (20/1). FGD ini sebagai rangkaian agenda KUII ke-7 yang digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Bangka Belitung pada 26-29 Februari 2020.

Zainulbahar berpendapat, MUI juga perlu membuat komisi khusus untuk penguatan regulasi dan kegiatan Baznas sebagai upaya mengamendemen UU Zakat. Dalam komisi itu diharapkan ada ahli hukum yang akan mengkaji draf amendemen hasil dari KUII nanti.

Ia juga memandang perlu adanya dukungan MUI berupa fatwa terkait pengembangan zakat saham. Dia menjelaskan, berdasarkan studi Pusat Kajian Strategis (Puskas) Baznas diketahui, total potensi zakat saat ini mencapai Rp 335,169 triliun. Dari total itu, sebesar Rp 100 triliun merupakan potensi zakat saham perusa-

haan di Indonesia.

"Jadi, perlu juga MUI, misalnya, memutuskan fatwa, sebab zakat saham saja itu bisa Rp 100 triliun, yang bisa dikenakan, misalnya MUI dengan membuat surat ke Bursa Efek Indonesia untuk dikenakan," ujar dia.

Zainulbahar berharap, KUII betul-betul menegaskan kepada pemerintah tentang potensi dana dari umat Islam melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ziswa). Menurut dia, total potensi zakat sebesar Rp 335 triliun itu sama dengan jumlah anggaran 11 kementerian untuk kegiatan sosial. Jika ini berhasil, kementerian-kementerian itu tidak perlu lagi mengurus kemiskinan.

"Karena itu, sudah diurus oleh Baznas dan mungkin BWI (Badan Wakaf Indonesia). Dan, Kongres Umat Islam harus mendorong itu, kalau ingin dana zakat mendampingi

dana APBN, tapi ini tidak pernah tercapai kalau pemerintah tidak punya *goodwill*," ujar dia.

Dalam forum yang sama, Senior GM Program & Partnership Management dari PKPU Human Initiative Aan Suherlan menilai, pengembangan ziswa perlu juga dilakukan di tingkat akar rumput, misalnya di masjid-masjid. Menurut dia, pengurus-pengurus masjid perlu diberdayakan agar memiliki kemampuan mengelola dana ziswa. "Masjid juga menjadi sarana transfer informasi yang baik kepada masyarakat. Dan, jangan lupa kita memiliki Forum Zakat, ini bisa menjadi sarana yang paling kuat untuk berkolaborasi," ujar dia.

Aan juga sepakat soal amendemen UU Zakat. Ia menilai, UU ini perlu diperkuat agar potensi zakat yang ada bisa dimaksimalkan.

■ ed: wachidah handasah

□ Pemerintah & DPR Sepakat Tak Ada Lagi Honorer PNS

JAKARTA (Pos Kota)

- Komisi II DPR RI dan Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) bersepakat ke depannya hanya PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja di instansi pemerintah. Tak ada lagi tenaga honorer PNS.

"Dengan demikian ke depannya secara bertahap tidak ada lagi jenis pegawai tetap, pegawai tidak tetap, tenaga honorer dan lainnya," kata Wakil Ketua Komisi II DPR, Arif Wibowo, di Kompleks Parlemen, Senin (20/1).

Ia menegaskan UU No 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya menge-

nal dua jenis status kepegawaian secara nasional, yaitu PNS dan PPPK.

Meski pelaksanaannya bertahap, ia memastikan tidak ada lagi status pegawai di luar dari yang telah diatur oleh Undang-undang.

"Saat ini masih ada, bahkan di daerah masih mengangkat pegawai kontrak. Yang mengeskan, mereka dibayar, masuk dalam kategori barang dan jasa, bukan lagi SDM. Yang seperti ini tidak kompatibel dengan undang-undang yang berlaku," paparnya.

KEPASTIAN SISTEM

Arif menyatakan kebijakan kepegawaian tidak boleh diberlakukan secara diskrimina-

tif. Dalam kesempatan tersebut, ia mempertanyakan kebijakan pemerintah yang memastikan sistem kepegawaian nasional bisa berjalan, sesuai dengan UU No 5/2014, karena jenis kepegawaian yang ada hanyalah PNS dan PPPK.

Terkait tenaga honorer, Arif menyampaikan, berdasarkan informasi yang diterimanya, masih ada rekrutmen pegawai yang jenisnya di luar dari yang sudah diatur oleh undang-undang.

"Masih ada rekrutmen jenis-jenis kepegawaian tertentu yang tidak sesuai dengan undang-undang, utamanya di daerah-daerah," ucap Arif. (rizal/bi)